Profil : Suardi, S.Sos., M.A.P

Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur 2024-2029

Suardi merupakan salah satu Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini menjabat pada periode kedua. saat ini mengampu Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Pada periode pertama mengampu Divisi Teknis Penyelenggaraan sampai setahun lebih pada periode kedua.

Riwayat Pendidikan

Beliau memiliki rekam jejak akademik pada Jurusan ilmu Politik Pemerintahan Program study Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, yang tentu berkaitan erat dengan tata kelola pemilu yang digeluti saat ini:

- Sarjana Ilmu Politik Pemerintahan (S.Sos.): Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar (Lulus tahun 1997).
- Magister Administrasi Publik (M.A.P.): Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda (Lulus tahun 2021).
- Pendidikan Dasar & Menengah: Menuntaskan pendidikan di Pinrang, Sulawesi Selatan (SDN Inpres 191, SMPN 1, dan SMAN 1 Pinrang).

Rekam Jejak Karier di KPU

Perjalanan karier Suardi menunjukkan konsistensi dalam mengawal proses demokrasi, dimulai dari tingkat kecamatan selaku Panwascam, KPU Kota hingga kini di tingkat Provinsi :

- Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (2005–2009): Memulai dedikasi sebagai Panwascam Bontang Selatan pada berbagai momen Pilkada dan Pemilu.
- Anggota & Ketua KPU Kota Bontang (2009–2019): Menjabat selama dua periode di tingkat kota, termasuk dipercaya sebagai Ketua KPU Kota Bontang pada periode 2014-2019.
- Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur (2019–2024): Pada periode pertama di tingkat provinsi, ia memegang peran strategis dalam mengoordinasikan teknis penyelenggaraan di seluruh wilayah Kaltim.
- Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur (2024–2029): Memasuki periode kedua, ia kembali dipercaya dan terpilih sebagai Komisioner KPU Kaltim.

Fokus Utama: Perencanaan, Data dan Informasi

Dalam masa jabatannya saat ini, Suardi mengawal proses Perencanaan, Data dan Informasi yang pada intinya memastikan perencanaan, pengelolaan data pemilih dan transformasi digital di KPU Kaltim berjalan dengan baik:

- Penyusunan program dan anggaran;
- Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi;
- Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.